

## Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan di Wilayah Pesisir: Studi Kasus Program Kelas Perahu di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

Muh.Arafah<sup>1</sup>, Haedar Akib<sup>2</sup>, Muh. Nur Yamin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

e-mail: nuryamin1@gmail.com

### Abstrak

Kesenjangan akses dan mutu pendidikan di wilayah kepulauan masih menjadi tantangan fundamental dalam pencapaian pendidikan inklusif di Indonesia. Program Kelas Perahu yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan inovasi kebijakan berbasis lokal yang dirancang untuk menjangkau anak-anak nelayan yang berisiko tinggi mengalami putus sekolah. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi Program Kelas Perahu berdasarkan enam dimensi evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (2003): efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif-induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap guru, orang tua, dan pejabat Dinas Pendidikan setempat. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini efektif memperluas akses pendidikan bagi anak-anak pesisir, namun belum sepenuhnya meningkatkan kualitas pembelajaran. Dimensi efisiensi dan responsivitas menunjukkan capaian tertinggi karena adanya partisipasi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokal. Sebaliknya, dimensi kecukupan, pemerataan, dan ketepatan masih lemah akibat keterbatasan guru, infrastruktur, serta kurangnya relevansi kurikulum dengan konteks maritim. Penelitian ini menegaskan pentingnya contextualized education policy dan tata kelola kolaboratif dalam mendesain kebijakan pendidikan di wilayah geografis marjinal. Rekomendasi utama mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal, dan digitalisasi sistem pembelajaran untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan pendidikan di wilayah kepulauan Indonesia.

**Kata kunci:** Program Kelas Perahu; Kebijakan Pendidikan; Wilayah Kepulauan; Evaluasi Kebijakan Publik

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, namun kesenjangan akses dan mutu pendidikan masih menjadi persoalan mendasar di Indonesia, terutama di wilayah kepulauan dan pesisir (Harahap et al., 2020; Liyana, 2023). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2023), tingkat partisipasi sekolah anak usia 7–15 tahun di wilayah pesisir dan kepulauan berada di bawah rata-rata nasional sebesar 93,7%, dengan angka putus sekolah mencapai 5,8%, dua kali lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan. Kesenjangan ini mencerminkan masih lemahnya pemerataan layanan pendidikan akibat keterbatasan infrastruktur, transportasi antar-pulau, serta distribusi tenaga pendidik. Kondisi tersebut mengancam terwujudnya pendidikan inklusif sebagaimana diamanatkan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 4) yang menekankan akses pendidikan berkualitas bagi semua anak tanpa memandang lokasi geografis (Hikmat, 2022; Suhendi, 2020).

Persoalan pendidikan di wilayah kepulauan bukan hanya soal akses fisik, tetapi juga menyangkut relevansi kurikulum dan fleksibilitas kebijakan. Model pendidikan konvensional sering kali gagal menjawab dinamika sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada aktivitas melaut. Akibatnya, anak-anak nelayan lebih rentan terhadap putus sekolah, bukan karena

kurangnya motivasi belajar, melainkan karena ketidaksesuaian sistem pendidikan dengan realitas kehidupan mereka (Aletheiani, 2022; Syatori et al., 2023). Keterbatasan transportasi, jadwal belajar yang kaku, dan kurikulum yang tidak kontekstual memperdalam ketimpangan pendidikan antarwilayah (Irawan et al., 2024).

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, Program Kelas Perahu dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sebagai inovasi kebijakan pendidikan berbasis lokal. Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak nelayan yang tinggal di pulau-pulau kecil dengan pendekatan pembelajaran kontekstual, fleksibel, dan berbasis komunitas. Program Kelas Perahu mengadopsi prinsip *place-based education* yang menekankan pentingnya pembelajaran berbasis potensi dan konteks lokal (Hamilton & Marckini-Polk, 2023; Hernandez Gonzalez, 2023). Namun, meskipun inovatif, efektivitas program ini belum banyak diteliti secara akademik, terutama terkait sejauh mana ia benar-benar mampu mencapai tujuan kebijakan pendidikan inklusif di wilayah kepulauan.

Dari perspektif kebijakan publik, evaluasi terhadap implementasi Kelas Perahu menjadi penting karena efektivitas kebijakan pendidikan tidak hanya diukur dari pencapaian administratif, tetapi juga dari keberhasilan substantifnya dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran (Romlah et al., 2023). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di wilayah marjinal sering kali menghadapi *policy delivery gap*, yakni ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan realitas pelaksanaannya di lapangan (Nurfadilah et al., 2024; Sa'adih et al., 2022; Syafii et al., 2025). Di Indonesia, penelitian evaluatif tentang kebijakan pendidikan kontekstual di wilayah kepulauan masih terbatas dan lebih berfokus pada aspek partisipasi masyarakat (Rahman et al., 2020; Setiadi, 2021), bukan pada efektivitas dan responsivitas kebijakan secara menyeluruh.

Kesenjangan penelitian tersebut menjadi urgensi utama dari studi ini. Meskipun program pendidikan berbasis komunitas telah banyak diterapkan di Indonesia, belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis Program Kelas Perahu melalui pendekatan evaluasi kebijakan publik yang terukur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi Program Kelas Perahu di Kabupaten Di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga relevan secara sosial, sehingga berkontribusi terhadap pencapaian pemerataan pendidikan nasional dan keberlanjutan sosial di kawasan kepulauan Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan Program Kelas Perahu sebagai kebijakan pendidikan berbasis lokal dalam menekan angka putus sekolah di wilayah kepulauan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena kebijakan pendidikan dari perspektif partisipan dan konteks sosial yang melingkupinya (Creswell, 2019). Desain penelitian bersifat induktif, di mana teori dan pemahaman konseptual dibangun berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan melalui proses eksploratif yang sistematis (Miles et al., 2018).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, yang merupakan wilayah pesisir dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi khas masyarakat nelayan. Wilayah ini dipilih karena menjadi pusat pelaksanaan Program Kelas Perahu yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep sebagai bentuk intervensi kebijakan dalam perluasan akses pendidikan dasar di pulau-pulau terluar. Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi enam dimensi kebijakan publik yang dikembangkan oleh (Dunn, 2003), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, untuk menilai sejauh mana program ini mampu mencapai tujuan substantifnya.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan dengan melibatkan berbagai informan kunci, seperti pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah SD dan SMP pelaksana program, pemerintah

kecamatan, guru pengelola kelas perahu, serta orang tua peserta didik. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah, laporan program, foto kegiatan, serta literatur akademik yang relevan dengan topik kebijakan pendidikan di wilayah kepulauan. Kombinasi kedua jenis data ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Sebagai instrumen utama penelitian, peneliti berperan aktif dalam seluruh proses pengumpulan data dengan dibantu alat perekam suara, kamera, dan pedoman wawancara semi-terstruktur. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung proses pelaksanaan Kelas Perahu dan interaksi sosial antara guru, siswa, dan masyarakat. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali persepsi, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi para pelaku program. Dokumentasi digunakan sebagai sumber pelengkap untuk memverifikasi data hasil observasi dan wawancara melalui bukti-bukti tertulis dan visual.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai sumber informan dan waktu yang berbeda. Selain itu, peneliti menerapkan prinsip ketekunan pengamatan, yaitu pengamatan berulang dan reflektif terhadap fenomena di lapangan guna memperkuat kredibilitas hasil penelitian. Validitas juga dijaga melalui proses member checking dengan mengonfirmasi interpretasi data kepada informan kunci agar temuan yang dihasilkan merepresentasikan kondisi nyata di lapangan.

Analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data menggunakan model analisis interaktif (Miles et al., 2018), yang meliputi tiga tahap utama yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data dilakukan melalui proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data dari catatan lapangan dan transkrip wawancara. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasi temuan dalam bentuk narasi tematik yang menggambarkan hubungan antarvariabel kebijakan. Tahap terakhir, penarikan kesimpulan, dilakukan secara iteratif dengan memverifikasi temuan melalui triangulasi dan refleksi teoretis. Proses ini memungkinkan peneliti menafsirkan dinamika implementasi kebijakan pendidikan secara mendalam, menghasilkan pemahaman kontekstual yang valid dan relevan dengan teori evaluasi kebijakan publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas Program Kelas Perahu

Efektivitas kebijakan khususnya dalam bidang pendidikan diukur berdasarkan sejauh mana program mampu mencapai tujuan substantifnya dalam meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran (Dunn, 2003). Dalam konteks Program Kelas Perahu di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, efektivitasnya diamati dari kemampuan program tersebut menjangkau kelompok sasaran utama, yakni anak-anak nelayan yang sebelumnya berisiko tinggi mengalami putus sekolah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa program ini telah menyediakan alternatif pembelajaran yang kontekstual dan fleksibel, memungkinkan peserta didik untuk tetap belajar sembari membantu pekerjaan orang tua di laut. Strategi pembelajaran berbasis modul mandiri serta pendampingan keluarga menjadi bentuk adaptasi sosial terhadap keterbatasan infrastruktur pendidikan di wilayah kepulauan. Meski demikian, peningkatan akses tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas hasil belajar. Data observasi menunjukkan variasi capaian akademik dan tingkat kehadiran siswa antarpulau yang cukup besar, mengindikasikan bahwa efektivitas program masih belum merata di seluruh lokasi pelaksanaan.

Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi faktor penting yang menjelaskan fenomena tersebut. Guru yang ditugaskan di wilayah kepulauan belum seluruhnya memiliki kompetensi pedagogik kontekstual, sementara sarana teknologi pendidikan masih sangat terbatas. Kondisi ini membuat proses pembelajaran sulit dievaluasi secara berkelanjutan, sehingga hasil belajar tidak dapat diukur secara objektif. Dalam konteks ini, efektivitas Kelas Perahu cenderung bersifat parsial. Berhasil pada aspek perluasan akses, namun belum pada aspek peningkatan mutu pembelajaran. Mengacu pada kerangka *policy evaluation* yang dikemukakan

oleh (Rossi et al., 2019), capaian tersebut dapat dikategorikan sebagai *output success*, yakni keberhasilan pada hasil langsung, tetapi belum mencapai *outcome success* yang menggambarkan dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan.

Kesenjangan antara keberhasilan akses dan lemahnya mutu pembelajaran ini memperkuat pandangan (Sabatier, 2007) mengenai adanya jarak antara desain kebijakan (*policy design*) dan pelaksanaannya di tingkat masyarakat (*policy delivery*). Dalam kasus Kelas Perahu, kebijakan telah dirancang secara ideal untuk menekan angka putus sekolah, namun belum diiringi dengan sistem pendukung yang memastikan keberlanjutan dan konsistensi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan administratif, tetapi juga oleh kemampuan program beradaptasi terhadap konteks sosial dan geografis masyarakat penerima manfaat.

Secara empiris, Kelas Perahu telah memberikan kontribusi positif terhadap kesadaran pendidikan masyarakat nelayan, namun tingkat efektivitasnya masih berada pada kategori menengah. Untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi, dibutuhkan kebijakan yang lebih holistik dan kontekstual, yang melibatkan pelatihan guru berbasis lingkungan maritim, supervisi akademik reguler, serta integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum pembelajaran. Dengan demikian, Kelas Perahu tidak hanya berperan sebagai program remedial terhadap angka putus sekolah, tetapi juga sebagai model pendidikan transformatif yang mampu menghasilkan *contextual learning outcomes* bagi masyarakat kepulauan.

## 2. Efisiensi Program Kelas Perahu

Efisiensi merupakan indikator penting dalam evaluasi kebijakan publik karena mengukur sejauh mana sumber daya, baik finansial, manusia, maupun waktu yang digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan (Dunn, 2003). Berdasarkan temuan lapangan, Program Kelas Perahu dinilai sebagai indikator yang paling berhasil dibandingkan lima dimensi evaluasi lainnya. Program ini memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara efektif, termasuk keterlibatan guru, orang tua, dan komunitas pesisir dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana seadanya, seperti perahu nelayan dan ruang belajar alternatif di lingkungan tempat tinggal siswa, tanpa membutuhkan infrastruktur fisik formal yang mahal. Strategi tersebut memungkinkan proses pendidikan tetap berjalan dengan biaya operasional yang rendah, sekaligus memperkuat kolaborasi sosial di tingkat komunitas.

Namun demikian, efisiensi yang dicapai masih bersifat teknis, belum sepenuhnya struktural dan sistemik. Dalam konteks kebijakan publik, efisiensi teknis menunjukkan kemampuan pelaksana kebijakan untuk menghemat biaya dan waktu, tetapi belum tentu diikuti oleh peningkatan efisiensi alokatif yang memastikan distribusi sumber daya secara adil dan berkelanjutan (Rossi et al., 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan pihak pemerintah setempat, pelaksanaan Kelas Perahu masih bergantung pada inisiatif individual guru dan dukungan informal masyarakat, bukan pada mekanisme kelembagaan yang stabil. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efisiensi program lebih ditentukan oleh *social capital* komunitas daripada sistem tata kelola yang terstruktur. Dalam kerangka teori implementasi kebijakan (Sabatier, 2007), hal ini mencerminkan fase awal keberhasilan program yang belum mencapai tahap institusionalisasi kebijakan (*policy institutionalization*).

Sesuai fakta di lapangan, efisiensi Kelas Perahu menunjukkan potensi besar untuk menjadi model pendidikan alternatif di wilayah kepulauan Indonesia. Penggunaan sumber daya berbasis komunitas membuktikan bahwa inovasi sosial dapat menekan biaya pelaksanaan program tanpa menurunkan mutu layanan pendidikan. Namun, efisiensi yang tinggi pada tataran pelaksanaan belum diikuti dengan efisiensi dalam mekanisme monitoring, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, program ini memerlukan dukungan kebijakan yang lebih formal melalui alokasi anggaran pendidikan berbasis wilayah kepulauan serta integrasi sistem evaluasi kinerja guru di lapangan. Pendekatan semacam ini akan memungkinkan efisiensi yang dicapai tidak hanya bersifat jangka pendek dan berbasis komunitas, tetapi juga bertransformasi menjadi efisiensi institusional yang berkelanjutan.

### 3. Kecukupan Program Kelas Perahu

Kecukupan merupakan dimensi evaluasi kebijakan yang menilai sejauh mana hasil program mampu memenuhi kebutuhan sosial yang menjadi sasaran kebijakan tersebut (Dunn, 2003). Dalam konteks Program Kelas Perahu di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah memberikan solusi alternatif bagi anak-anak nelayan yang kesulitan mengakses pendidikan formal. Meskipun demikian, tingkat kecukupan program dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat kepulauan masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan orang tua siswa, keterbatasan fasilitas pendukung seperti alat tulis, media pembelajaran, serta akses terhadap materi ajar digital menjadi kendala utama yang menurunkan kecukupan layanan. Selain itu, tidak semua wilayah di kecamatan ini mendapatkan akses setara terhadap program, karena faktor geografis dan minimnya transportasi antar pulau.

Dari perspektif analisis kebijakan, kondisi ini menunjukkan bahwa Program Kelas Perahu baru mencapai tahap *partial adequacy*, yaitu keberhasilan dalam menyediakan layanan dasar namun belum mampu menjawab kompleksitas kebutuhan pendidikan di wilayah pesisir (Rossi et al., 2019). Faktor struktural seperti keterbatasan logistik, infrastruktur pendidikan, dan sistem pendanaan berbasis daratan memperkuat kesenjangan pelayanan antar wilayah. Dalam kerangka teori *equity efficiency trade-off*, kebijakan ini tampak efisien dalam penggunaan sumber daya, tetapi belum cukup untuk menjamin pemerataan hasil (Sabatier, 2007). Dengan demikian, meskipun program berhasil memperluas akses bagi sebagian siswa, secara substantif belum memenuhi tingkat kecukupan yang ideal dalam konteks keadilan pendidikan.

Lebih jauh, kecukupan yang belum optimal juga disebabkan oleh absennya mekanisme pengawasan yang terukur terhadap capaian pembelajaran. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa informan lapangan, proses penilaian akademik siswa dalam Kelas Perahu masih bersifat subjektif dan bergantung pada interpretasi guru masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa dimensi input dan output program belum terhubung secara sistematis melalui indikator kinerja yang terukur. Dalam perspektif kebijakan pendidikan berkelanjutan, kecukupan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas fisik, tetapi juga oleh kontinuitas sistem evaluasi dan monitoring berbasis data (Hanushek & Woessmann, 2020). Oleh karena itu, peningkatan kecukupan Program Kelas Perahu memerlukan intervensi strategis berupa digitalisasi bahan ajar, peningkatan kompetensi guru di wilayah kepulauan, serta kolaborasi antarsektor dalam penyediaan sarana transportasi pendidikan. Pendekatan integratif semacam ini akan memungkinkan terciptanya sistem pendidikan yang tidak hanya *accessible* tetapi juga *adequate* dan berkelanjutan bagi komunitas pesisir di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

### 4. Pemerataan Program Kelas Perahu

Pemerataan merupakan dimensi evaluasi kebijakan yang menilai sejauh mana suatu program mampu memberikan akses dan manfaat yang setara bagi seluruh kelompok sasaran tanpa diskriminasi geografis maupun sosial (Dunn, 2003). Dalam konteks Program Kelas Perahu di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip pemerataan pendidikan belum sepenuhnya terwujud. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dan masyarakat, sebagian besar penerima manfaat berasal dari wilayah pesisir utama yang relatif mudah dijangkau oleh tenaga pengajar. Sementara itu, pulau-pulau kecil dan terpencil di sekitar wilayah penelitian masih menghadapi hambatan serius dalam memperoleh layanan pendidikan karena keterbatasan transportasi laut, infrastruktur komunikasi, dan ketersediaan tenaga pendidik. Ketimpangan geografis ini mengakibatkan disparitas kesempatan belajar antarwilayah, yang pada akhirnya menurunkan derajat pemerataan program secara keseluruhan.

Kondisi tersebut menggambarkan fenomena yang dalam literatur kebijakan publik dikenal sebagai *spatial inequality in policy implementation* (Anderson, 2011), yakni ketidakmerataan hasil kebijakan yang dipicu oleh perbedaan kapasitas lokal dan jarak spasial terhadap pusat layanan. Walaupun tujuan utama program adalah menghadirkan model pendidikan yang inklusif dan fleksibel bagi anak-anak nelayan, pelaksanaannya masih bergantung pada

*geographical proximity* dan jaringan sosial lokal. Dalam perspektif Sabatier (2007), hal ini mencerminkan keterbatasan pada fase *policy delivery*, di mana efektivitas distribusi layanan belum didukung oleh mekanisme koordinasi lintas wilayah dan dukungan logistik yang sistemik. Akibatnya, pemerataan program lebih bersifat normative.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belum adanya kebijakan khusus dari pemerintah daerah terkait insentif bagi guru yang bertugas di pulau terpencil memperburuk ketimpangan tersebut. Sebagian besar guru enggan ditugaskan ke lokasi yang sulit dijangkau karena kendala transportasi, fasilitas, dan biaya tambahan yang tidak tertanggung oleh anggaran operasional sekolah. Dalam konteks teori *equity-based policy design* (OECD, 2020), hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik yang berorientasi pemerataan memerlukan dukungan struktural berupa kompensasi geografis dan diferensiasi anggaran berbasis kebutuhan lokal. Oleh karena itu, peningkatan pemerataan Program Kelas Perahu memerlukan pendekatan desentralisasi kebijakan yang lebih adaptif, dengan memperkuat koordinasi antar pulau serta pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pembelajaran jarak jauh.

Implikasi empiris dari temuan ini menunjukkan bahwa tanpa kebijakan afirmatif yang eksplisit terhadap wilayah terisolasi, Program Kelas Perahu berisiko memperluas kesenjangan pendidikan antar pulau alih-alih menguranginya. Pemerataan bukan hanya tentang distribusi fasilitas, melainkan juga tentang kemampuan kebijakan untuk menyeimbangkan konteks sosial-ekonomi dan geografis masyarakat. Oleh sebab itu, rekomendasi strategis untuk peningkatan pemerataan mencakup tiga hal: (1) penguatan logistik pendidikan melalui subsidi transportasi antarpulau, (2) pemberian insentif berbasis risiko bagi tenaga pengajar di wilayah terpencil, dan (3) integrasi sistem pembelajaran berbasis digital untuk menjangkau siswa yang tidak dapat hadir secara fisik di kelas. Dengan demikian, pemerataan dalam Program Kelas Perahu tidak hanya dapat dipahami sebagai dimensi administratif, tetapi juga sebagai upaya transformatif menuju keadilan pendidikan yang substantif di wilayah kepulauan Indonesia.

## 5. Responsivitas Program Kelas Perahu

Responsivitas kebijakan mengacu pada sejauh mana implementasi program mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan, aspirasi, dan dinamika masyarakat sasaran (Dunn, 2003). Dalam konteks Program Kelas Perahu, hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini cukup responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat nelayan di wilayah kepulauan. Berdasarkan wawancara dengan camat, kepala sekolah, dan orang tua siswa, diketahui bahwa pola pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual, melalui penggunaan modul mandiri serta keterlibatan keluarga dalam proses belajar, telah memberikan ruang adaptasi yang baik bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan waktu dan mobilitas. Hal ini menunjukkan bahwa desain program berhasil mengakomodasi kebutuhan spesifik anak-anak pesisir yang harus membagi waktu antara belajar dan membantu pekerjaan orang tua di laut.

Namun, tingkat responsivitas program ini belum sepenuhnya terinstitusionalisasi. Mekanisme komunikasi antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah masih bersifat informal dan sangat bergantung pada inisiatif individu guru atau kepala sekolah. Dalam perspektif teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), kondisi ini menunjukkan bahwa interaksi kolaboratif telah terbentuk, tetapi belum mencapai tahap *institutionalized collaboration*, yakni kemitraan formal yang berkelanjutan antara aktor-aktor kebijakan. Program Kelas Perahu telah membangun trust dan shared understanding di tingkat lokal, namun belum memiliki mekanisme partisipasi masyarakat yang terstruktur dalam pengambilan keputusan atau perencanaan program.

Keterbatasan tersebut sejalan dengan pandangan (Kooiman, 2003) dalam kerangka *interactive governance*, yang menekankan bahwa responsiveness dalam kebijakan publik tidak hanya berarti kemampuan beradaptasi terhadap tuntutan sosial, tetapi juga mencakup proses komunikasi reflektif antaraktor yang berlangsung secara sistematis. Dalam konteks ini, Kelas Perahu dapat dikatakan memiliki *functional responsiveness*, yakni kemampuan menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi lapangan, namun belum mencapai *strategic responsiveness*, yaitu kemampuan kebijakan untuk memperbaharui diri melalui umpan balik dan pembelajaran kelembagaan.

Untuk memperkuat dimensi responsivitas kebijakan, diperlukan sistem feedback loop formal yang melibatkan guru, orang tua, pemerintah daerah, dan komunitas lokal dalam forum kolaboratif yang reguler. Pendekatan ini tidak hanya akan memperluas partisipasi masyarakat, tetapi juga memastikan keberlanjutan kebijakan melalui proses evaluasi partisipatif. Dengan demikian, Program Kelas Perahu berpotensi berkembang dari kebijakan adaptif menjadi kebijakan kolaboratif yang responsif secara institusional terhadap perubahan kebutuhan masyarakat kepulauan.

## 6. Ketepatan Program Kelas Perahu

Ketepatan kebijakan menggambarkan sejauh mana suatu program sesuai dengan kebutuhan sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat sasaran (Dunn, 2003). Berdasarkan hasil penelitian, Program Kelas Perahu di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara dinilai belum sepenuhnya tepat dalam menjawab karakteristik dan konteks kehidupan masyarakat pesisir. Meskipun program ini dirancang untuk menekan angka putus sekolah dan memberikan fleksibilitas pembelajaran bagi anak-anak nelayan, temuan lapangan menunjukkan bahwa materi ajar yang digunakan masih terlalu berorientasi pada kurikulum umum dan belum mencerminkan realitas sosial-ekonomi masyarakat lokal. Guru sering kali mengadopsi modul dari sekolah daratan tanpa adaptasi kontekstual, sehingga peserta didik sulit mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman hidup mereka.

Sesui temuan lapangan, kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *policy intention* dan *policy relevance*. Dalam perspektif evaluasi kebijakan pendidikan, ketepatan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan teknis implementasi, tetapi juga oleh tingkat kesesuaian program dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2019). Pendekatan homogen terhadap kurikulum menyebabkan pembelajaran menjadi kurang bermakna (*meaningless learning*) bagi anak-anak pesisir yang memiliki latar belakang ekonomi berbasis maritim. Fenomena ini sesuai dengan kritik (Sabatier, 2007) mengenai lemahnya *proses policy translation*, di mana kebijakan yang dirancang secara *top-down* sering kali gagal menerjemahkan kebutuhan mikro masyarakat ke dalam praktik implementasi.

Dalam konteks penelitian ini, Program Kelas Perahu dapat dikategorikan sebagai kebijakan dengan tingkat ketepatan parsial. Program ini tepat dalam aspek tujuan makro, yakni pemerataan akses Pendidikan, namun belum tepat dalam aspek mikro, yaitu relevansi isi dan metode pembelajaran. Ketidaktepatan tersebut juga terlihat pada sistem evaluasi hasil belajar yang masih mengacu pada standar formal sekolah darat tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial siswa. Dalam teori *contextualized education policy* (Tikly & Barrett, 2011), kebijakan pendidikan yang tepat adalah kebijakan yang mampu beradaptasi terhadap konteks lokal melalui integrasi budaya, bahasa, dan praktik ekonomi masyarakat ke dalam proses belajar. Berdasarkan prinsip tersebut, peningkatan ketepatan Kelas Perahu memerlukan revisi kurikulum yang mengintegrasikan pengetahuan lokal (*local wisdom*) dan keterampilan maritim, serta penguatan kapasitas guru dalam merancang pembelajaran kontekstual.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan di wilayah kepulauan tidak dapat hanya diukur melalui indikator formal seperti kehadiran atau kelulusan, tetapi juga melalui tingkat relevansi program terhadap kehidupan peserta didik. Ketepatan kebijakan yang rendah berisiko menurunkan motivasi belajar dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan jangka panjang. Oleh karena itu, Program Kelas Perahu perlu diarahkan menuju model *place-based education* yang lebih sensitif terhadap ekologi sosial masyarakat pesisir. Dengan demikian, kebijakan ini dapat bertransformasi dari sekadar intervensi administratif menjadi instrumen transformatif yang menumbuhkan kesadaran belajar berbasis konteks lokal dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Program Kelas Perahu merupakan bentuk inovasi kebijakan pendidikan berbasis lokal yang berperan penting dalam memperluas akses pendidikan di wilayah kepulauan, khususnya bagi anak-anak nelayan yang berisiko tinggi mengalami putus

sekolah. Evaluasi terhadap enam dimensi kebijakan publik menunjukkan bahwa keberhasilan program paling menonjol terletak pada aspek efisiensi dan responsivitas sosial, di mana keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokal berhasil menciptakan model pembelajaran yang adaptif dan hemat biaya. Namun, empat dimensi lainnya yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, dan ketepatan, belum menunjukkan hasil optimal karena keterbatasan tenaga pendidik, infrastruktur, serta relevansi kurikulum terhadap konteks sosial-ekonomi pesisir.

Penelitian ini memperluas pemahaman tentang *contextualized education policy* dengan menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh struktur administratif, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan untuk beradaptasi terhadap kondisi sosial dan geografis masyarakat sasaran. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan tiga arah kebijakan utama: (1) memperkuat kapasitas kelembagaan dan pembiayaan agar program tidak bergantung pada inisiatif individu; (2) mengembangkan kurikulum kontekstual berbasis kearifan maritim yang relevan dengan kehidupan masyarakat nelayan, serta; (3) membangun sistem monitoring partisipatif berbasis data yang memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi program. Dengan dukungan kebijakan yang berkelanjutan, Program Kelas Perahu berpotensi menjadi prototipe pendidikan kontekstual di wilayah kepulauan Indonesia yang selaras dengan *Sustainable Development Goal 4* tentang pendidikan inklusif dan bermutu.

Selain memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kebijakan pendidikan daerah, penelitian ini juga berkontribusi secara teoretis dalam memperluas kerangka evaluasi kebijakan publik di konteks geografis marjinal. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi dimensi digitalisasi pembelajaran dan kolaborasi lintas sektor agar kebijakan pendidikan di wilayah kepulauan dapat bertransformasi dari program adaptif menjadi sistem pembelajaran yang resilien dan berkeadilan sosial.

## REFERENSI

- Aletheiani, D. R. (2022). Schooling practices, curriculum, and educational opportunities of the children in the fisherman' neighbourhoods in Indonesia archipelago. *Curriculum Journal*, 33(2), 238–245. <https://doi.org/10.1002/curj.144>
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gadjah Mada.
- Hamilton, E., & Marckini-Polk, L. (2023). The impact of place-based education on middle school students' environmental literacy and stewardship. *Cogent Education*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2022.2163789>
- Harahap, E. S., Maipita, I., & Rahmadana, M. F. (2020). Determinant Analysis of Education Inequalities in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1067–1082. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.937>
- Hernandez Gonzalez, F. (2023). Exploring the Affordances of Place-Based Education for Advancing Sustainability Education: The Role of Cognitive, Socio-Emotional and Behavioural Learning. *Education Sciences*, 13(7). <https://doi.org/10.3390/educsci13070676>
- Hikmat, H. (2022). Implementation of Inclusive Education for Children With Special Needs in Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 1888–1896. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2338>
- Irawan, B., Simon, J. C., Alif, M. Z., Saliman, A. R., Fatmawati, E., & Judijanto, L. (2024). Addressing Educational Inequality Through Sustainable Policies: an Evaluation from the Education Policy and Sdgs Perspective in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e3152. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.3152>
- Liyana, N. F. (2023). The Effect Of Educational Inequality On Economic Growth In Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 5(1), 144–153. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v5i1.2259>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods*

- sourcebook. Sage publications.
- Nurfadilah, A., Ash-Shidiq, A. U., Sukma, A., Mardiansyah, A., Lestari, A. P., Rahmah, W. R., & Sonya, E. R. (2024). Implementation of Equal Distribution of Education for Indonesia's Disadvantaged, Frontier, and Outermost Regions. *Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, 14(1), 15–24. <https://doi.org/10.15575/socio-politica.v14i1.30183>
- Rahman, H., & Syamsuddin, M. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan di wilayah marjinal: Analisis model partisipatif. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 45–59
- Romlah, S., Imron, A., Maisyaroh, Sunandar, A., & Dami, Z. A. (2023). A free education policy in Indonesia for equitable access and improvement of the quality of learning. *Cogent Education*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2245734>
- Sa'adih, Hutauruk, R. P., & Putri, M. P. (2022). Policy Implementation in the Education Sector: A Case Study of Free Tuition Policy in South Tangerang City. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains (JSHS)* ..., 07(02), 104–108. <http://jurnal.saburai.id/index.php/js/shs/article/view/4305%0Ahttp://jurnal.saburai.id/index.php/js/shs/article/download/4305/2467>
- Sabatier, P. A. (2007). *Theories of the Policy Process* (2nd ed.). Westview Press.
- Setiadi, T. (2021). Local education innovation and access equity in rural Indonesia. *Indonesian Journal of Educational Research*, 6(1), 33–48.
- Suhendi. (2020). The challenges of inclusive education in Lebanon. *Journal of Research in Business, Economics, and Education*, 2(5), 331–343. <https://doi.org/10.1080/09687590600679980>
- Syafii, M. H., Purnomo, H., & Rahmatullah, A. S. (2025). Inclusive Education and Social Transformation: Analysing the Role of Education Policy in Increasing Equality Among Rural Students in Indonesia. *Educational Research for Social Change*, 14(1), 43–69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15311475>
- Syatori, A., Ramdhani, S., & Khikmawati, N. (2023). Structural and Cultural Aspects of Fisherman Family Education Problems in Waruduwur Cirebon. *Masyarakat, Jurnal Sosiologi*, 28(1), 1–23. <https://doi.org/10.7454/mjs.v28i1.13560>